

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 1 dan 7

Tak Ada Lagi Tunggakan

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Semarang merasa sudah membayar tagihan sejumlah rumah sakit. Total dana yang dikucurkan untuk itu mencapai Rp 138,944 miliar.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Bimantoro, menjelaskan, proses pembayaran dilakukan Selasa (25/9). Jika ada pihak rumah sakit yang mengaku belum mendapatkan uang

tersebut, ia pun menilai wajar karena pembayaran dilakukan melalui bank dengan sistem kliring.

Total dana Rp 138,944 miliar dibagikan kepada 20 rumah sakit yang berada di bawah naungan BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Sementara lima rumah sakit lain yang berada di bawah naungannya tidak mengalami masalah tunggakan.

■ KE HALAMAN 7

Tak Ada...

■ DARI HALAMAN 1

Ia memastikan sudah tidak ada lagi tunggakan pembaruan di rumah sakit yang berada di wilayahnya Semarang dan Demak. Selain membayar klaim Jaminan Kesehatan, pihaknya juga telah membayarkan denda tunggakan yang menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Termasuk ke apotek dan klinik yang nilainya Rp 3,5 miliar.

Pembayaran ini dilakukan usai menerima kucuran dana dari Kementerian Keuangan. Diketahui, secara nasional kucuran dana yang diberikan Kemenkeu kepada

BPJS Kesehatan mencapai Rp 4,9 triliun.

Jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan BPJS Kesehatan sekitar Rp 7,4 triliun. Sementara BPJS Kesehatan Cabang Semarang mendapatkan bantuan tiga persen atau senilai Rp 138,944 miliar.

Bimantoro menjelaskan, tertundanya pembayaran ini merupakan isu nasional akibat dari besarnya pengeluaran tidak sebanding dengan premi atau uang masuk.

Di BPJS Kesehatan Cabang Semarang sendiri rata-rata setiap bulan menerima

luran Rp 64 miliar, sementara dana yang digunakan untuk membayar rumah sakit berkisar Rp 219,7 miliar per bulan.

Selain itu, menurutnya keterlambatan ini juga akibat masalah administrasi rumah sakit dalam mengajukan klaim. "Ada rumah sakit klaim April, nagihnya Juni, Juli, bahkan Agustus. Saat ditagih berkas tidak lengkap. Kalau dibilang seperti itu apa bisa dibilang kami yang menunggak," katanya.

Seperti misalnya di RS Roemani Muhammadiyah Semarang yang mengaku belum mendapat pemba-

ayaran empat bulan. Padahal dalam kasus ini, pihak rumah sakitlah yang belum memberikan tagihan sehingga belum mendapat pencairan dana dari BPJS Kesehatan.

Bahkan hingga saat ini pelayanan dari bulan Juni di RS Roemani belum ditagihkan. Oleh sebab itu ia menolak jika disebut menunggak tagihan dari RS Roemani.

Menurutnya, BPJS Kesehatan juga tidak ingin menunda pembayaran tagihan. Jika menunggak akan dikenakan denda dua kali bunga deposito atau sekitar 12 persen setahun. (Tim)